

BAB I

PENDAHULUAN

1.1.Deskripsi

Studio Konsep Perancangan Arsitektur (SKPA) mengangkat judul **“Perancangan Masjid Kampung dengan Pendekatan Profetik di Kawasan Banjarsari Surakarta”**. Berikut penjelasan terkait istilah-istilah yang digunakan dalam judul tersebut.

Masjid Kampung : Masjid kampung atau masuk dalam kategori masjid permukiman adalah masjid yang secara lokasi berada di tengah-tengah permukiman masyarakat dan dimiliki oleh masyarakat serta langsung bersentuhan dengan realitas kehidupan umat sebagai pusat komunitas dan kehidupan (Andika, 2021).

Konsep Arsitektur Profetik : Pendekatan baru dalam dunia arsitektur yang selaras dengan ilmu sosial profetik gagasan Prof. Kuntowijoyo. paradigma ilmu sosial profetik yang menekankan pada pemihakan terhadap kaum mustadhafin memiliki misi membentuk cendekiawan muslim yang mampu memanfaatkan keilmuannya untuk berperan menanggulangi isu di masyarakat. Arsitektur Profetik yang diambil dari pemikiran Kuntowijoyo melalui ilmu sosial profetik dan ilmu arsitektur akan menjadi paradigma dalam mengevaluasi dampak pembangunan dan masalah yang berkaitan dengan isu Arsitektur diklasifikasikan melalui etika profetik yaitu liberasi, humanisasi, dan transendensi (Suryo, 2021).

Kawasan Banjarsari : Merupakan sebuah Kecamatan yang berada di Surakarta Kota Surakarta, Jawa Tengah, Indonesia. Kecamatan ini merupakan satu-satunya di kota Surakarta yang sebelum kemerdekaan Indonesia menjadi bagian dari wilayah kota raja dari Kadipaten Praja Mangkunegaran. empat kecamatan lainnya merupakan wilayah dari kota raja Kasunanan Surakarta (Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, 2019).

Desain “**Perancangan Masjid Kampung dengan Pendekatan Profetik di Kawasan Banjarsari Surakarta**” merupakan Masjid Kampung yang dapat mewujudkan aktivasi masjid agar penyelenggaraan fungsional masjid bisa berjalan kembali serta bisa menjadi pemenuh kebutuhan dan persoalan umat sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang berada di sekitarnya. Seperti yang dikatakan oleh Drs. Sidi Gazalba (1994) bahwa untuk menyelenggarakan fungsional masjid yang dapat menjadi pemenuh kebutuhan umat masjid harus menyediakan keseimbangan antara dimensi aktivitas ibadah *mahdah* dan ibadah *ghairu mahdah*.

1.2.Latar Belakang

1.2.1. Hilangnya Fungsional Masjid di Era Sekarang

Selama satu tahun terakhir marak dilakukan pembangunan masjid jami dan agung di berbagai kota di Indonesia. Ada beberapa masjid baru maupun yang sedang dicanangkan dalam waktu dekat ini yaitu Masjid Al Jabbar di Jawa Barat, Masjid Raya Sheikh Zayed di Surakarta, dan Pembangunan Masjid Seribu Bulan di Banyumas. Adapun masjid-masjid jami yang megah dan sudah lama dibangun diantaranya adalah Masjid Kubah Emas Depok, Masjid Istiqlal Jakarta, Masjid Raya Baiturrahman Aceh, Masjid Agung Jawa Tengah, Masjid Al Akbar Surabaya, Masjid Raya Sumatra Barat, Masjid Raya Makassar, Masjid Kubah 99 Asmaul Husna Makassar, Masjid Al-Irsyad Bandung, Masjid Agung Tuban, dan lain-lain. Namun, rata-rata masjid megah yang tergolong masjid agung tidak ramah terhadap

aktivitas ummat diluar ibadah mahdah seperti sholat wajib, ibadah jum'at, zakat dan puasa. Sangat sulit ditemukan masjid agung yang ramah dan mendukung kegiatan ibadah ghairu mahdah seperti bermuamalah, bersafar, dan lain sebagainya (Ayyub, 2007). Satu-satunya masjid megah yang penulis jumpai cukup sukses mewadahi ibadah mahdah dan ghairu mahdah adalah Masjid Namira Lamongan itupun tidak tergolong masjid agung karena pembangunan maupun pengelolaan masjid dari kelompok individu dan yayasan (Sholikhah, H.A., 2021).

1.2.2. Permasalahan Masjid di Indonesia Sekarang

Kondisi masjid yang terjadi sekarang adalah masjid agung didesain hanya sebagai tempat pemenuh ibadah mahdah saja dengan rancangan skala besar yang bisa menampung orang sebanyak-banyaknya dalam masjid untuk sholat (Arif Hidayat, 2014). Secara fungsional, sangat sedikit desain masjid agung yang menghadirkan ruang profan yang betul-betul dibuat untuk aktivitas ibadah ghairu mahdah di kompleks masjid (Haq, 2023). Justru masjid kecil yang bisa memenuhi aktivitas ibadah mahdah dan ghairu mahdah secara seimbang sehingga bisa menjadi solusi kebutuhan ummat adalah masjid-masjid kecil dengan fasilitas tambahan yang semi permanen. Masjid tersebut tidak dirancang untuk bisa memenuhi kebutuhan ummat yang massal tapi karena berhasil mewujudkan fungsional masjid sehingga jamaah meluber dengan sendirinya dan harus menambah ruang profan tambahan. Contoh masjid kecil yang berhasil memenuhi kebutuhan ummatnya adalah Masjid Jogokaryan, dan Real Masjid 2.0 di Jogja. Secara fungsional masjid tersebut sudah memenuhi, tapi secara kebutuhan ruang dan arsitektur, masjid-masjid ini masih belum memadai secara maksimal kebutuhan ibadah ghairu mahdah di ruang profannya.

1.2.3. Permasalahan masjid di Surakarta

Menurut Ayub (2007), beberapa masalah yang sering terjadi di masjid Surakarta sama halnya dengan permasalahan masjid di seluruh Indonesia berupa Masjid yang tidak terawat dengan baik, termasuk tidak bersih atau rusak. Kurangnya perhatian terhadap masjid dari pemerintah setempat atau masyarakat

sekitar. Kurangnya kegiatan di masjid yang dapat memperkuat tali silaturahmi antar jamaah dan mengembangkan kegiatan keagamaan. Tidak adanya program pendidikan Islam yang terstruktur dan terencana. Terjadinya perbedaan pendapat atau perselisihan antara jamaah atau pengurus masjid yang dapat mengganggu ketenangan dan harmoni di dalam masjid. Namun, setiap masjid memiliki kondisi yang berbeda-beda dan permasalahan yang muncul juga dapat bervariasi tergantung pada lingkungan dan situasi setempat. Menurut Hanafi (2015), masalah yang dihadapi oleh masjid di Surakarta (atau di mana pun di Indonesia) dapat meliputi:

1. Kekurangan dana untuk perawatan dan pemeliharaan masjid.
2. Kurangnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga kebersihan dan keamanan masjid.
3. Tidak adanya sistem pengelolaan yang baik untuk menjaga dan mengatur kegiatan di masjid.
4. Perbedaan pendapat antara pengurus masjid dan jamaah mengenai pengelolaan dan penggunaan dana masjid.
5. Kurangnya kegiatan sosial dan keagamaan yang menarik bagi jamaah, sehingga mengurangi minat mereka untuk datang ke masjid.
6. Keterbatasan ruang dan fasilitas yang memadai untuk kegiatan di masjid.

Masalah-masalah ini dapat mempengaruhi kualitas dan efektivitas kegiatan di masjid, serta dapat mempengaruhi jumlah jamaah yang datang ke masjid. Oleh karena itu, penting bagi pengurus masjid dan masyarakat setempat untuk bekerja sama dalam menjaga dan mengembangkan masjid agar dapat memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat sekitar.

1.2.4. Urgensi Aktivasi Masjid di Kecamatan Banjarsari Surakarta

Kemiskinan merupakan masalah pembangunan yang harus diatasi karena masalah ketimpangan dapat mengancam persatuan dan kesatuan negara serta mempersulit pelaksanaan pembangunan ekonomi nasional yang berdasarkan

pemerataan. Ketimpangan merupakan masalah klasik yang tidak dapat dihilangkan, hanya dapat dikurangi sampai tingkat yang dapat diterima ketika sistem sosial tertentu berkembang untuk menjaga keharmonisan dalam sistem tersebut.

Dalam era otonomi daerah saat ini, setiap daerah harus mampu mengelola seluruh potensi wilayahnya untuk mendukung munculnya proses pembangunan yang berkeadilan tinggi dan disertai dengan pertumbuhan ekonomi yang baik. Dengan demikian, ketimpangan pembangunan, prestasi dan pendapatan antar kelompok atau wilayah akan berkurang.

Tabel 1 Gini Ratio Menurut Kabupaten/Kota di Jawa Tengah, Tahun 2015

Kabupaten/Kota	Gini Ratio		
Kabupaten Cilacap	0.34	Kabupaten Kudus	0.37
Kabupaten Banyumas	0.32	Kabupaten Jepara	0.31
Kabupaten Purbalingga	0.30	Kabupaten Demak	0.32
Kabupaten Banjarnegara	0.34	Kabupaten Semarang	0.31
Kabupaten Kebumen	0.28	Kabupaten Temanggung	0.38
Kabupaten Purworejo	0.38	Kabupaten Kendal	0.34
Kabupaten Wonosobo	0.35	Kabupaten Batang	0.29
Kabupaten Magelang	0.34	Kabupaten Pekalongan	0.29
Kabupaten Boyolali	0.30	Kabupaten Pemalang	0.28
Kabupaten Klaten	0.36	Kabupaten Tegal	0.33
Kabupaten Sukoharjo	0.35	Kabupaten Brebes	0.32
Kabupaten Wonogiri	0.33	Kota Magelang	0.36
Kabupaten Karanganyar	0.36	Kota Surakarta	0.36
		Kota Salatiga	0.35

Kabupaten Sragen	0.33	Kota Semarang	0.31
Kabupaten Grobogan	0.34	Kota Pekalongan	0.34
Kabupaten Blora	0.39	Kota Tegal	0.31
Kabupaten Rembang	0.33		
Kabupaten Pati	0.31		

Sumber : BPS, diolah dari hasil Susenas 2015 Modul Konsumsi

"Gini ratio" atau "indeks Gini" adalah sebuah ukuran statistik yang digunakan untuk mengukur ketimpangan atau distribusi ketimpangan dalam sebuah distribusi data. Biasanya digunakan dalam konteks ekonomi dan ilmu sosial untuk mengukur ketidaksetaraan dalam pendapatan atau kekayaan. Indeks Gini memiliki nilai antara 0 dan 1, di mana 0 mengindikasikan distribusi yang sempurna merata (tidak ada ketimpangan), sementara 1 mengindikasikan distribusi yang sempurna tidak merata (ketimpangan maksimum). Semakin tinggi nilai indeks Gini, semakin besar tingkat ketimpangan dalam distribusi data yang diamati. Dari Tabel 1.1 di atas dapat dilihat bahwa Kota Surakarta merupakan kota yang memiliki tingkat ketimpangan yang relatif tinggi dibandingkan dengan kota-kota lain di Provinsi Jawa Tengah. Keadaan ini berimplikasi pada adanya ketimpangan pendapatan antar masyarakat perkotaan berdasarkan data tersebut dan distribusi pendapatan masyarakat perkotaan kurang merata.

Kota Surakarta terbagi menjadi 5 kecamatan: Laweyan, Serengan, Pasar Kliwon dan Banjarsari. Dan peneliti ingin melihat kecamatan Banjarsari karena memiliki jumlah penduduk terbesar dengan mata pencaharian yang paling beragam. Berdasarkan Tabel 1.1, Kota Surakarta merupakan kota dengan indeks gini tertinggi setelah Magelang, Boyolali dan Karanganyar. Artinya Kota Surakarta merupakan kota menurut Tabel 1.3. Kecamatan Banjarsari terdiri dari 13 kecamatan, dimana tiga kecamatan yaitu Banjarsari, Sumber, Nusukan dan Kadipiro memiliki kesenjangan jumlah tenaga kerja terdaftar dan tidak terdaftar yang cukup besar, sehingga terpilih menjadi kecamatan tersebut. contoh situs pencarian.

Perbedaan klasifikasi mata pencaharian mempengaruhi jumlah pendapatan yang diterima oleh masing-masing kelompok pekerja di masyarakat. Kesenjangan pendapatan ini mempengaruhi ketimpangan pendapatan antar kelompok dengan pendapatan yang minimalis. Ketimpangan penghidupan masyarakat perkotaan yang lebih beragam menyebabkan ketimpangan pendapatan semakin besar.

Sebagai contoh wilayah, kondisi kehidupan masyarakat yang tinggal di Kabupaten Banjarsari yang merupakan pusat Kota Surakarta pada tahun 2020 adalah sebagai berikut:

Tabel 2 Penduduk wilayah Kota Surakarta Kecamatan Banjarsari berdasarkan mata pencaharian

Kelurahan	Jenis Pekerjaan					
	Tidak Belum Bekerja			Mengurus RT		
	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1. Mangkubumen	887	854	1 741	-	1 131	1 131
2. Timuran	210	216	426	-	389	389
3. Keprabon	253	254	507	-	346	346
4. Ketelan	287	296	583	-	466	466
5. Punggawan	365	383	748	-	544	544
6. Kestalan	248	242	490	-	349	349
7. Setabelan	358	329	687	-	503	503
8. Gilingan	1 919	1 783	3 702	-	2 930	2 930
9. Manahan	990	1 014	2 004	-	1 330	1 330
10. Sumber	1 802	1 724	3 526	-	2 229	2 229
11. Nusukan	3 047	2 839	5 886	-	3 636	3 636
12. Kadipiro	2 314	2 268	4 582	-	3 087	3 087
13. Banyuanyar	1 564	1 434	2 998	-	1 527	1 527
14. Joglo	1 054	966	2 020	-	1 607	1 607
15. Banjarsari	1 849	1 724	3 573	-	2 196	2 196
Jumlah	17 147	16 326	33 473	-	22 270	22 270

Sumber : BPS Surakarta, 2020

Tabel 1.2 menunjukkan distribusi mata pencaharian masyarakat di kecamatan kota Surakarta. Hal ini menggambarkan kemungkinan besar

ketimpangan pendapatan yang ada di setiap desa. Standar deviasi penghidupan tersebut diakibatkan oleh distribusi penghidupan di berbagai sektor penghidupan.

Tabel 3 Standar deviasi sebaran mata pencaharian penduduk Kecamatan Banjarsari Kota Surakarta

Kelurahan	Standar deviasi sebaran mata pencaharian
Mangkubumen	9.201.541
Timuran	6.276.436
Keprabon	3.692.291
Ketelan	6.171.445
Punggawan	7.936.696
Kestalan	3.272.252
Setabelan	3.899.016
Gilingan	16.616.115
Manahan	10.934.891
Sumber	32.312.169
Nusukan	24.523.132
Kadipiro	23.328.837
Banyuanyar	16.652.238

Sumber: BPS Surakarta, 2020

Berdasarkan data sebaran subsisten sebelumnya, diketahui sebaran terbesar terjadi di Kecamatan Sumber, disusul Kecamatan Nusukan dan Kadipiro. Hal ini memungkinkan terjadinya disparitas pendapatan yang besar antara ketiga mukim tersebut.

1.2.5. Menyelenggarakan Fungsi Masjid

Masjid sesuai dengan pengertian harfiahnya memiliki fungsi sebagai tempat bersujud (Ibid, 2009). Pengertian bersujud ini bukan hanya terbatas pada ibadah sholat saja tapi melainkan pada ibadah-ibadah yang ditunjukkan untuk mengabdikan dan diniatkan untuk beribadah juga merupakan aktivitas bersujud. Sebagaimana

menurut Sidi Gazalba (1994), sujud itu bisa diartikan sebagai segala kegiatan yang dilakukan dengan dasar mengabdikan kepada Allah SWT, dengan kata lain sebagai tempat melaksanakan segala aktifitas kaum muslim berkaitan dengan kepatuhan kepada Tuhan. Masjid itu harus memenuhi 2 hukum keseimbangan jika ingin kembali menyelenggarakan fungsi masjid sebagaimana semestinya. 2 hukum itu adalah yaitu hukum keseimbangan hubungan antara manusia dengan Tuhan dan hubungan antara manusia dengan manusia serta hukum keseimbangan antara pemenuhan kebutuhan dunia dan kebutuhan akhirat. Oleh karena itu, fungsi masjid sebagai pusat peradaban Islam harus meliputi fungsi yang berdimensi akhirat yaitu ibadah mahdah, dan fungsi yang berdimensi dunia yaitu ibadah ghairu mahdah.

1.2.6. Aktivasi Fungsi Masjid dengan Nilai Profetik

Masjid perlu memakmurkan dan menghadirkan solusi atas kesenjangan ekonomi yang terjadi di masyarakat sekitarnya. Salah satu wilayah di Solo Kecamatan Banjarsari merupakan daerah dengan jumlah tuna wisma yang tinggi. Wilayah Banjarsari juga mengalami peningkatan kemiskinan pada rentan waktu-waktu ini (BPS Solo, 2021). Di tengah kondisi masyarakat yang mengalami penurunan ekonomi dan kesenjangan kesejahteraan, dibangun masjid megah dengan tujuan sebagai wisata religi. Hadirnya tempat baru sebagai wisata memang bisa menjadi magnet perekonomian disana. Tapi kelonjakan perekonomian yang terbentuk tidak ada keterikatan dengan ummat melainkan hanya kepentingan Penulis yang kurang maksimal dalam pemakmuran masyarakat disekitarnya. Optimalisasi ruang dan fungsional masjid sebagai pemenuh ibadah ghairu mahdah seperti muamalah bisa membuka masjid sebagai pemenuh kebutuhan dan perbaikan ekonomi masyarakat.

Oleh karenanya, diperlukan adanya desain yang menyeimbangkan penyediaan aktivitas ibadah mahdah dan ghairu mahdah sejak awal. Rancangan desain masjid dengan pertimbangan aktivitas yang mengisi setiap ruang yang dibuat akan memudahkan masjid dalam memenuhi kebutuhan ummatnya. Pendekatan Arsitektur Profetik sangat diperlukan sebagai fundamental desain masjid terutama masjid kampung dengan penekanan tiga nilai etika profetik yaitu liberasi

(mencegah kemungkaran), humanisasi (menyeru pada kebajikan), dan transendensi (nilai spiritualitas sifatnya vertikal) (Suryo, 2021). Pengadaan ruang-ruang yang memadahi aktivitas muamalah dan kebutuhan masyarakat umum bisa dilakukan dengan pendekatan ilmu sosial profetik. Maka dari itu, judul yang diambil adalah Perancangan Masjid Kampung dengan Pendekatan Profetik di Kawasan Bajarsari Surakarta. Sebagaimana menurut Sidi Gazalba (1994) pemenuhan kebutuhan ummat lewat masjid dapat tercapai jika dapat menyeimbangkan fungsional dari ibadah *mahdah* dan ibadah *ghairuh mahdah*.

1.3.Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka diperoleh perumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana nilai Arsitektur profetik bisa diintegrasikan terhadap pendekatan desain masjid yang bisa menyeimbangkan penyediaan aktivitas ibadah mahdah dan ghairu mahdah?
2. Bagaimana cara mengitegrasikan Pendekatan Arsitektur Profetik terhadap desain masjid yang bisa menyeimbangkan penyediaan aktivitas ibadah mahdah dan ghairu mahdah?

1.4.Tujuan dan Sasaran

1.4.1. Tujuan

Tujuan dari perancangan Masjid Kampung dengan Pendekatan Profetik ini adalah untuk mewujudkan Masjid yang bisa menjalankan fungsional masjid dengan memenuhi kebutuhan aktivitas ibadah mahdah dan ibadah ghairu mahdah secara seimbang agar kebutuhan ummat dari berbagai lini dapat terpenuhi dari masjid.

1.4.2. Sasaran

Perancangan Masjid Kampung dengan Pendekatan Profetik di Kawasan Bajarsari Surakarta memiliki sasaran sebagai berikut :

1. Masyarakat Menengah Kebawah merasakan dampak dari hadirnya masjid di tengah-tengah permukiman mereka.
2. Gelandangan atau Tuna Wisma mendapatkan manfaat dan solusi atas berbagai persoalan hidup mereka dari hadirnya masjid sebagai tempat pemenuh dan pemecah masalah kebutuhan ummat.

1.5. Metode Pembahasan

Guna terlaksananya perancangan masjid kampung dengan pendekatan profetik yang baik dan dapat dipertanggungjawabkan, maka diperlukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Pembentukan standar nilai profetika
2. Identifikasi kebutuhan ummat
3. Integrasi desain masjid dan integrasi nilai profetika

1.6. Sistematika Penulisan

BAB I Pendahuluan

Pendahuluan merupakan gambaran umum tentang fenomena mengenai topik yang diangkat. Membahas tentang latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat perancangan, batasan dan lingkup perancangan, metode pembahasan, dan sistematika laporan.

BAB II Tinjauan Pustaka

Tinjauan Pustaka berisi tentang teori-teori dan dasar-dasar sumber data yang berkaitan dengan topik penelitian yang digunakan untuk mendasari penganalisaan masalah.

BAB III Gambaran Umum Lokasi dan Gagasan Perencanaan

berisi tentang terdiri dari lokasi / Data Fisik, data sebaran aktifitas, penduduk dan lingkungan sosial lain / data non fisik (data 5 tahun terakhir dari BPS, kantor dinas, DPU dan sebagainya). Gagasan Perancangan sesuai dengan judul yang diangkat juga termasuk dalam bab ini.

BAB IV Analisa Data dan Hasil Pembahasan

Analisa Data dan Hasil Pembahasan berisi tentang diskripsi dan gambaran keadaan yang diteliti secara sistematis dan dilaksanakan sesudah data-data dari hasil observasi, wawancara dan studi pustaka yang kemudian disajikan secara diskriptif.

BAB V Penutup

Penutup berisi tentang kesimpulan dan saran berupa pandangan penulis dari hasil analisa data.